

ANALISA YURIDIS NORMATIF TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 11-14-21-126 dan 136/PUU-VII/2009 (Mengenai Pengujian UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional dan UU No. 9 Tahun 2009 Tentang Badan Hukum Pendidikan)



Oleh: Alas Maliky (06400121)

Law

Dibuat: 2011-02-02 , dengan 6 file(s).

Keywords: Putusan, Kontroversial, Pendidikan, Perubahan.

ABSTRAKSI

Putusan Mahkamah Konstitusi NOMOR 11-14-21-126 dan 136/PUU-VII/2009 mengenai Pengujian UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) dan UU No. 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan (BHP) yang diajukan oleh para pemohon merupakan salah satu putusan Mahkamah Konstitusi yang cukup kontroversial. Sekilas putusan ini dinilai tidak mendukung penerapan prinsip nirlaba di Perguruan Tinggi, dan dinilai akan mengakibatkan terjadinya langkah mundur bagi dunia pendidikan.

Penelitian ini mengambil rumusan masalah: apa yang menjadi dasar Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan dan akibat hukum yang ditimbulkan pasca perubahan frasa sebagian pasal UU Sisdiknas dan pembatalan UU BHP?

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, dimana bahan hukum yang digunakan adalah UUD RI 1945, UU Sisdiknas, UU BHP dan Putusan Mahkamah Konstitusi sebagai bahan hukum primer. Sedangkan bahan hukum sekunder bersumber pada buku, jurnal dan makalah. Kemudian data-data hasil penelitian di analisa secara konten-analisis.

Dari penelitian ditemukan dasar Hakim Konstitusi mengeluarkan putusan, yaitu melihat kedudukan hukum (legal standing) para pemohon dan proses persidangan. Namun yang berbeda dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang lain adalah digunakannya Yurisprudensi. Sedangkan akibat hukum yang dimunculkan pasca keluarnya putusan diantaranya merubah frasa beberapa pasal di UU Sisdiknas dan membatalkan keseluruhan UU BHP.

Kesimpulannya, dengan digunakan Yurisprudensi dalam putusan menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi sama dengan peradilan pada umumnya. Sedangkan akibat hukumnya adalah berubahnya makna dalam frasa pasal UU Sisdiknas dan tidak ada lagi kewajiban penyamaan bentuk badan hukum pendidikan lagi. Saran, sebaiknya Perguruan Tinggi menerapkan sistem BLU sebelum disetujuinya RUU BHP yang baru agar tidak terjadi kekosongan hukum.

ABSTRACT

Constitution Court Decision No 11-14-21-126 and 136/PUU-VII/2009 about Trial of Law No.20 / 2003 about National Education System and Law No.9 / 2009 about Education Legal Institution recommended by requester is one of the most controversial Constitution Court. In a glance, this decision didn't support the application of non-profit principle in Higher Education and would cost a step back in Education world

The research took statement of problems: What the nature caused Constitution Court to declare the decision, and what law effect caused post-phrase changing some of National Education Law and the cancellation of Education Legal Institution Law?

The research used juridical normative approach, where the law material used was the Basic Constitution 1945, National Education System Law, Education Legal Institution Law and Constitution Court Decision as primary law material. While secondary law material sourced from books, journals, and paper. Data would be analyzed using contain analysis.

From the research, there found that the nature of constitution Judge declare the decision from the perspective of law position (legal standing) of the requester, and trial process. But, what difference with other constitution Court decision, is the used of jurisprudence. While law effect appeared post-decision was the changing of several phrases in Education System Law and the cancellation of Education Legal Institution.

The conclusion, by jurisprudence in decision, Constitution court would be similar with the general court. While the law effect, there is a change meaning in section phrases of National System Education Law and there would be no more Education legal institution equalizer. The writer suggest University to apply BLU system before the new Education Legal Institution Law Design approved to avoid legal emptiness.

Keywords: Decision, Controversial, Education, Change